

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini akan disajikan Pencanaan Strategis dan Perjanjian Kinerja (PK). Perencanaan Strategis dimaksud merupakan perencanaan lima tahunan yakni tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Perencanaan lima tahunan tersebut telah termuat dalam dokumen RPJMD 2016-2021. Sebaliknya Perjanjian Kinerja merupakan perencanaan kinerja tahunan yakni tahun 2016. Dengan demikian maka yang disajikan dalam laporan kinerja ini adalah capaian kinerja selama tahun pertama masa periodisasi RPJMD 2016-2021. Capaian kinerja dihitung dari perjanjian kinerja tahun 2016.

2.1 RENCANA STRATEGIS

2.1.1 VISI

Pemerintah Kabupaten Manggarai mempunyai visi yang berbunyi ***“TERWUJUDNYA MANGGARAI YANG MAJU, MAKMUR, SEJAHTERA, ADIL DAN MERATA SERTA DIRIDHOI TUHAN YANG MAHA ESA”***. Makna yang terkandung di dalam Visi ini dapat dijelaskan seperti berikut :

- ❖ *Manggarai* itu sebuah entitas di mana di dalamnya terdapat unsur Pemerintah Daerah, Rakyat dan wilayah Kabupaten Manggarai.
- ❖ *Maju* mengandung makna bahwa pembangunan Kabupaten Manggarai dimulai dari titik dimana pemerintahan sebelumnya berakhir baik kuantitas maupun kualitas pembangunan di semua sektor. Membangun tidak selalu mulai dari titik nol.
- ❖ *Kemakmuran (Welfare)* mengandung makna bahwa terjadi perubahan terukur dan berkelanjutan sektor-sektor yang memberi kontribusi pada pencapaian produk domestik regional bruto Kabupaten Manggarai seperti sektor PERTANIAN (*tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan*); sektor pertambangan & penggalian; sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas & air minum; sektor bangunan/konstruksi; sektor perdagangan, restoran & hotel; pengangkutan & komunikasi; sektor keuangan persewahan & jasa perusahaan dan sektor Jasa.

- ❖ **Kesejahteraan (*Prosperity*)** berhubungan dengan perubahan terukur di semua aspek kesehatan masyarakat yang berkualitas dan merata; pengelolaan pendidikan yang demokratis, bermutu dan akuntabel; kehidupan spiritual yang terus membaik, ketertiban dan keamanan terus terjamin, pengelolaan lingkungan hidup yang berwawasan ekosistem dan berbasis tata ruang; penegakan supremasi hukum, kesetaraan gender dan hak-hak asasi manusia serta pembangunan yang berbasis budaya Manggarai.
- ❖ **Adil** mengandung makna bahwa proporsionalitas program dan kegiatan pembangunan diharapkan mempertimbangkan kondisi demografi, topografi, potensi wilayah, bencana alam dan sebaran penduduk miskin.
- ❖ **Merata** mengandung arti bahwa setiap alokasi anggaran dan kegiatan pembangunan harus mampu mencegah terjadinya disparitas persoalan antar kelompok masyarakat berdasarkan perbedaan tingkat pendapatan, pekerjaan, jenis kelamin, usia dan kondisi sosial lainnya.
- ❖ **Diridohi Tuhan yang Maha Esa** mengandung makna bahwa pelaksanaan visi dimaksud merupakan bagian dari penghayatan iman dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa.

2.1.2 MISI

Visi sebagaimana terurai di atas, kemudian dijabarkan ke dalam beberapa misi yakni :

- ❖ Memajukan ekonomi Manggarai dengan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh sumber daya yang tersedia.
- ❖ Memajukan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas dan merata.
- ❖ Memajukan pendidikan yang demokratis, bermutu dan akuntabel.
- ❖ Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berwawasan ekosistem dan berbasis tata ruang.
- ❖ Mewujudkan supremasi hukum, kesetaraan gender dan hak-hak asasi manusia serta pembangunan yang berbasis budaya manggarai.

2.1.3 TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur serta akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dan disesuaikan

dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif tujuan organisasi menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam misi organisasi. Tujuan organisasi meletakkan kerangka prioritas untuk memberi fokus dan arah pada semua program dan kegiatan.

Mengacu pada visi dan misi Kabupaten Manggarai serta didasarkan pada isu-isu strategik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai tahun 2016-2021, maka ditetapkan tujuan (*ada 28 tujuan untuk 5 misi*) dari masing-masing misi Kabupaten Manggarai tahun 2016-2021, yaitu :

Misi 1 Meningkatkan perekonomian Manggarai dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia didukung pembangunan infrastruktur yang berkualitas, yang diuraikan dalam 5 (lima) tujuan :

- a. Meningkatkan kualitas produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan yang berorientasi pada permintaan pasar;
- b. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bebas korupsi, profesional dan berbasis hukum;
- c. Meningkatkan keanekaragaman diversifikasi ketersediaan dan konsumsi pangan
- d. Meningkatkan produksi perikanan;
- e. menciptakan kelancaran transportasi laut menghubungkan pelabuhan dengan destinasi wisata pulau flores.

Misi 2 Memajukan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas dan merata, dengan 7 (tujuh) tujuan :

- a. Meningkatkan status gizi masyarakat.
- b. Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi (AKI/AKB).
- c. Meningkatkan kualitas layanan BLUD RSUD dr. BEN MBOY sebagai RS tipe C dan RS rujukan regional.
- d. Menurunkan TFR (Total Fertility Rate).
- e. Meningkatkan CPR.
- f. Menurunkan LPP Kab. Manggarai.
- g. Menurunkan unmet need.

Misi 3 Memajukan pendidikan yang demokratis, bermutu dan akuntabel. Misi ini mempunyai 3 (tiga) tujuan :

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat pada jenjang pendidikan PAUD, pendidikan dasar dan menengah.
- b. Meningkatkan rata-rata nilai UN.
- c. Terwujudnya minat budaya baca masyarakat.

Misi 4 Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berwawasan ekosistem dan berbasis tata ruang, yang terdiri atas 3 (tiga) tujuan :

- a. Menurunkan jumlah kawasan kritis di dalam Kawasan Hutan dan luar Kawasan Hutan.
- b. Menurunkan prosentase kerusakan hutan.
- c. Mengurangi pencemaran tanah, air dan udara yang disebabkan oleh adanya usaha/kegiatan.

Misi 5 Mewujudkan supremasi hukum, kesetaraan gender dan Hak Asasi Manusia. Misi ini terdiri atas 10 (sepuluh) tujuan :

- a. Menjamin Kepastian hukum atas hak Kepemilikan.
- b. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- c. Meningkatkan pencegahan dan penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan dan anak, eksploitasi dan perdagangan perempuan dan anak.
- d. Meningkatkan kesetaraan gender baik dalam bidang Pembangunan, Swasta maupun Politik.
- e. Meningkatkan Aksesibilitas Perlindungan Sosial bagi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- f. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang berkualitas, bebas korupsi, profesional dan berbasis hukum.
- g. Meningkatkan tertib Administrasi Kependudukan.
- h. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.
- i. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- j. Meningkatkan pelayanan bencana kebakaran.

2.1.4 SASARAN

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih

pendek dari tujuan seperti tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan. Sasaran pembangunan yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai selama 5 (lima) tahun (*ada 33 sasaran untuk 28 tujuan*), masing-masing berdasarkan tujuan pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan yang berorientasi pada permintaan pasar, tujuan ini dijabarkan ke dalam sasaran :
 - Meningkatnya kualitas produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan yang berorientasi pada permintaan pasar.
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bebas korupsi, profesional dan berbasis hukum, tujuan ini mempunyai sasaran :
 - Meningkatnya Jumlah PAD.
3. Meningkatkan Produksi Perikanan, dan sasarannya:
 - Meningkatnya produksi perikanan.
4. Meningkatkan keanekaragaman diversifikasi ketersediaan dan konsumsi pangan, dengan sasaran :
 - Meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan angka kecukupan energy aktual
5. Menciptakan kelancaran transportasi laut menghubungkan pelabuhan dengan destinasi wisata pulau flores, dengan sasaran :
 - Meningkatnya arus kunjungan wisatawan bahari pada destinasi wisata di wilayah Flores.
 - Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan jalan dan jembatan.
6. Meningkatkan status gizi masyarakat, dengan sasaran :
 - Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita
7. Menurunkan angka kematian Ibu dan Bayi, dengan sasaran:
 - Menurunkan Angka Kematian Bayi.
 - Menurunnya Angka Kematian Ibu.
8. Meningkatkan kualitas layanan BLUD RSUD dr. Ben MBOY sebagai RS tipe C dan RS rujukan regional, dengan sasaran:
 - Meningkatnya mutu pelayanan rumah sakit.
9. Menurunkan TFR (Total Fertility Rate), dengan sasaran:
 - Menurunnya TFR.

10. Meningkatkan CPR, dengan sasaran :
 - Meningkatkan CPR.
11. Menurunkan LPP Kabupaten Manggarai, dengan sasaran :
 - Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk
12. Menurunkan unmet need, dengan sasaran :
 - Menurunnya Unmet need.
13. Meningkatkan partisipasi masyarakat pada jenjang pendidikan PAUD, pendidikan dasar dan menengah, dengan sasaran :
 - Meningkatkan APK.
 - Meningkatkan APM.
14. Meningkatkan rata-rata nilai UN, dengan sasaran :
 - Meningkatkan rata-rata nilai UN
15. Terwujudnya minat budaya baca masyarakat, dengan sasaran :
 - Meningkatkan minat baca masyarakat
16. Menurunkan jumlah Kawasan kritis di dalam Kawasan Hutan dan luar Kawasan Hutan, dengan sasaran :
 - Menurunnya luas lahan kritis
17. Menurunkan prosentase Kerusakan Hutan, dengan sasaran :
 - Menurunnya Kerusakan Hutan
18. Mengurangi pencemaran tanah, air dan udara yang disebabkan oleh adanya usaha/kegiatan, dengan sasaran :
 - Tercapainya ambang batas pencemaran tanah, air dan udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Menjamin kepastian hukum atas hak kepemilikan, dengan sasaran :
 - Terwujudnya Penyelesaian konflik tanah dan masalah sisial lainnya
20. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan sasaran :
 - Meningkatkan kualitas produk hukum daerah.
21. Meningkatkan pencegahan dan penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan dan anak, eksploitasi dan perdagangan perempuan dan anak, dengan sasaran :
 - Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

22. Meningkatkan kesetaraan gender baik dalam bidang Pembangunan, Swasta maupun Publik, dengan sasaran :
 - Meningkatnya peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan
23. Meningkatkan aksesibilitas perlindungan sosial bagi masyarakat penyandang masalah, dengan sasaran :
 - Meningkatnya jumlah rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi KK miskin.
 - Meningkatnya penanganan PMKS.
24. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas, bebas korupsi, profesional dan berbasis hukum, dengan sasaran :
 - Tertibnya pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah.
 - Meningkatnya rekomendasi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK RI.
25. Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan, dengan sasaran :
 - Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan.
26. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas Tenaga Kerja, dengan sasaran adalah :
 - Meningkatnya kompetensi dan produktivitas Tenaga Kerja.
27. Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, dengan sasaran :
 - Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
28. Meningkatkan pelayanan Bencana Kebakaran, dengan sasaran :
 - Meningkatnya pelayanan bencana.

2.2 CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

2.2.1 KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN DAERAH

Kebijakan merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan juga berarti arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai untuk menentukan program dan kegiatan yang signifikan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan merupakan kumpulan keputusan-keputusan pimpinan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan atau dengan kata lain kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau

kegiatan tertentu. Kebijakan mengatur mekanisme tindakan atas program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang akan dijadikan pedoman atau pegangan atau petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan agar berjalan efektif dan efisien guna mewujudkan tujuan dan sasaran. Mewujudkan tujuan dan sasaran merupakan bagian integral mewujudkan visi dan misi.

Kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut *(diambil dari Kebijakan Umum pada RPJMD hal. 292)*

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya secara efisien dan efektif
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
- c. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu
- d. Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan penanggulangan perubahan iklim
- e. Melanjutkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bebas korupsi, professional, berbasis hukum dan reformasi birokrasi

2.2.2 PROGRAM STRATEGIS

Program adalah kumpulan kegiatan nyata yang dirumuskan secara sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit organisasi pemerintah ataupun dilakukan dalam rangka kerjasama organisasi pemerintah dengan masyarakat atau kegiatan yang merupakan partisipasi aktif masyarakat sendiri guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu.

Adapun program yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam RPJMD Tahun 2016-2020 adalah sebanyak 104 Program. Dalam laporan ini hanya disajikan 87 Program karena ada beberapa program yang sama untuk tujuan yang sama dan ada satu program yang menjadi kewenangan Provinsi. Ke-87 program tersebut akan dikelompokkan sesuai sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana terbaca pada matriks/tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Pengelompokan Program
Berdasarkan Sasaran

Sasaran		Program	
No.	Uraian	No.	Nama Program
1.	Meningkatnya kualitas produksi dan produktifitas pertanian dan perkebunan yang berorientasi pada permintaan pasar	1. 2.	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian/ Perkebunan Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
2.	Meningkatnya Jumlah PAD	1.	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
3.	Meningkatnya Produksi Perikanan	1. 2. 3.	Pengembangan Perikanan Tangkap Pengembangan Budidaya Perikanan Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
4.	Meningkatnya Keanekaragaman Konsumsi Pangan Angka Kecukupan Energi Actual	1. 2. 3. 4.	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Masyarakat Peningkatan Kesejahteraan Petani Peningkatan Ketahanan Pangan Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
5.	Meningkatnya Arus Kunjungan Wisatawan Bahari pada Destinasi Wisata di Flores	1.	Peningkatan Pelayanan Angkutan
6.	Meningkatnya Keselamatan dan Kenyamanan Jalan dan Jembatan	1. 2. 3. 4.	Pembangunan Jalan dan Jembatan Tersusunnya data dan informasi jalan dan jembatan melalui aplikasi Sistem Informasi/ Data Base Jalan Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
7.	Menurunnya prevelensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	1. 2. 3. 4.	Perbaikan Gizi Masyarakat Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perbaikan Gizi Masyarakat Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

8.	Menurunnya Angka Kematian Bayi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 2. Pengadaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan jaringannya; 3. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 4. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK);
9.	Menurunnya Angka Kematian Ibu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 2. Kesehatan Reproduksi Remaja; 3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Upaya Kesehatan Masyarakat 5. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 6. Pengadaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan jaringannya; 7. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 8. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
10.	Meningkatnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standarisasi Pelayanan Kesehatan 2. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak
11.	Menurunnya TFR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarga Berencana 2. Pelayanan Kontrasepsi
12.	Meningkatnya CPR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2. Peningkatan Displin Aparatur 3. Keluarga Berencana 4. Pelayanan Kontrasepsi
13.	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan peranserta masyarakat dalam Program KB/KR mandiri

		2.	Keluarga Berencana
		3.	Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
		4.	Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
		5.	Promosi Kesehatan Ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
14.	Menurunnya <i>Unmet Need</i>	1.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
		2.	Peningkatan Disiplin Aparatur
		3.	Keluarga Berencana
15.	Meningkatnya APK	1.	Pendidikan Anak Usia Dini
		2.	Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
16.	Meningkatnya APM	1.	Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
17.	Meningkatnya Rata-rata Nilai UN	1.	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun
18.	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	1.	Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
19.	Menurunnya Luas Lahan Kritis	1.	Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
20.	Menurunnya Prosentase Kerusakan Hutan	1.	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
21.	Tercapainya ambang Batas Pencemaran tanah, air dan udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1.	Pengendalian Pencemaran Perusakan Lingkungan Hidup
22.	Terwujudnya penyelesaian konflik tanah dan masalah sosial lainnya	1.	Penataan Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
		2.	Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
23.	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah	3.	Penataan Peraturan Perundang-undangan
24.	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	1.	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas anak dan perempuan

		2.	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
		3.	Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
		4.	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
25.	Meningkatnya peran Perempuan dalam berbagai bidang Pembangunan	1.	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas anak dan perempuan
		2.	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
		3.	Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
		4.	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
26.	Meningkatnya jumlah Rehabilitasi Rumah Tidak layak huni bagi kk miskin	1.	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya
27.	Meningkatnya penanganan PMKS	1.	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah
		2.	Pembinaan Para penyandang cacat dan trauma
		3.	Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial
28.	Tertibnya Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah dan Aset Daerah	1.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
29.	Meningkatnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan BPK RI	1.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
30.	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	1.	Penetapan Sekretaris Desa/Kelurahan sebagai Registar Desa/Kelurahan
		2.	Pemberdayaan RT, RW, dan Kepala Lingkungan sebagai Pencatat Dokumen Kependudukan

		3.	Penertiban Penduduk tanpa dokumen dan berdokumen ganda
		4.	Penyusunan Peraturan Bupati
		5.	Koordinasi Lintas sektor untuk memperoleh data pendukung dalam pengurusan dokumen kependudukan
31.	Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.	Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
		2.	Peningkatan Kesempatan Kerja
32.	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	1.	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
		2.	Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan
		3.	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
		4.	Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi
		5.	Peningkatan Ketahanan Pangan
		6.	Perencanaan Pembangunan Daerah
33.	Meningkatnya pelayanan bencana	1.	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam

2.3. RENCANA KINERJA TAHUN 2016

Rencana Kinerja Tahun 2016 merupakan rencana kinerja yang disusun setelah penetapan KUA-PPA Kabupaten Manggarai Tahun 2016. Rencana kinerja dimaksud harus didukung oleh ketersediaan anggaran yang memadai dan dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin. Berikut Rencana Kinerja Tahun 2016 :

**FOMULIR RENCANA KINERJA
TINGKAT PEMERINTAH KABUPATEN**

KABUPATEN : MANGGARAI
TAHUN ANGGARAN : 2016

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1		2		3
TUJUAN 1 : MENINGKATKAN KUALITAS PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN YANG BERORIENTASI PADA PERMINTAAN PASAR				
1.1	Meningkatnya kualitas produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan yang berorientasi pada permintaan pasar	1.1.1	PDRB Kabupaten Manggarai (ADHB)	Rp. 3.373.209
		1.1.2	Pertumbuhan PDRB ADHK	5,20 %
		1.1.3	PDRB ADHK	Rp. 2.472.374,19
		1.1.4	PDRB perkapita ADHB	Rp. 9.810.442
		1.1.5	Persentase penduduk miskin	19,73 %
		1.1.6	Pertumbuhan Ekonomi	5,20 %
		1.1.7	Produktivitas Padi atau bahan pangan utama Lokal lainnya per hektar	4,71 Ton/Ha
		1.1.8	Kontribusi sektor pertanian / perkebunan terhadap PDRB ADHB (dlm juta rupiah)	Rp. 25.74
		1.1.9	Kontribusi sektor Perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	1,93 %
		1.1.10	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	8,95 %
		1.1.11	Kontribusi sector industri terhadap PDRB	0,5 %
		1.1.12	Persentase pertumbuhan industri	0,2 %
		1.1.13	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp. 1.968.323
TUJUAN 2 : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS, BEBAS KORUPSI , PROFESIONAL DAN BERBASIS HUKUM				
2.1	Meningkatnya jumlah PAD	2.1.1	Jumlah PAD (dalam jutaan)	Rp. 82
		2.1.2	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	5 Perda
TUJUAN 3 : MENINGKATKAN PRODUKSI PERIKANAN				
3.1	Meningkatnya produksi perikanan	3.1.1	Produksi perikanan	6.000 Ton
		3.1.2	Produksi perikanan budidaya :	137 Ton
			- Air tawar	115 Ton
			- Air payau	22 Ton
3.1.3	Produksi rumput laut	13,00 Ton		
TUJUAN 4 : MENINGKATKAN KEANEKARAGAMAN DIVERSIFIKASI KETERSEDIAAN DAN KONSUMSI PANGAN				
4.1	Meningkatnya keaneka-ragaman konsumsi pangan angka kecukupan energi actual	4.1.1	Ketersediaan pangan utama	100,00 %
		4.1.2	Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRD	25,74 %

		4.1.3	Ketersediaan energi dan protein perkapita	100,00 %
		4.1.4	Penguatan cadangan pangan	71,00 %
		4.1.5	Skor pola pangan harapan (PPH)	85,90 %
TUJUAN 5 : MENCIPTAKAN KELANCARAN TRANSPORTASI LAUT MENGHUBUNGKAN PELABUHAN DENGAN DESTINASI WISATA PULAU FLORES				
5.1	Meningkatnya arus kunjungan wisatawan bahari pada destinasi wisata di wilayah Flores	5.1.1	Kunjungan wisata	100,00 %
		5.1.2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	0,79 %
5.2	Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan jalan dan jembatan	5.2.1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,50 Km/Unit
		5.2.2	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	58,34 %
		5.2.3	Jumlah arus penumpang angkutan umum	2.203.43 Penumpang 7
TUJUAN 6 : MENINGKATKAN STATUS GIZI MASYARAKAT				
6.1	Menurunya prevalensi kekurangan gizi (undeweight) pada anak balita	6.1.1	Persentase balita gizi buruk yang tertangani	100,00 %
		6.1.2	Persentase rumah tinggal bersanitasi	64,99 %
		6.1.3	Angka usia harapan hidup	67,69 Tahun
TUJUAN 7 : MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI				
7.1	Menurunya angka kematian bayi	7.1.1	Angka kematian bayi	16,13 KH
7.2	Menurunya angka kematian ibu	7.2.1	Angka kematian ibu	126,25 KH
TUJUAN 8 : MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN BLUD RSUD dr. BEN MBOY SEBAGAI RS TYPE C DAN RS RUJUKAN REGIONAL				
8.1	Meningkatnya mutu layanan rumah sakit	8.1.1	Persentase tingkat kepuasan pelanggan	80,00 %
TUJUAN 9 : MENURUNKAN TFR (TOTAL FERTILITY RATE)				
9.1	Menurunya TFR	9.1.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga (TFR)	3,35 %
TUJUAN 10 : MENINGKATKAN CPR				
10.1	Meningkatnya CPR	10.1.1	Cakupan peserta KB aktif (CPR)	67,63 %
TUJUAN 11 : MENURUNKAN LPP KABUPATEN MANGGARAI				
11.1	Menurunya laju pertumbuhan penduduk	11.1.1	Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,63 %
TUJUAN 12 : MENURUNKAN UNMET NEED				
12.1	Menurunnya Unmet Need	12.1.1	Persentase cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tetapi tidak terpenuhi	15,94 %

TUJUAN 13 : MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA JENJANG PENDIDIKAN PAUD,PENDIDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH				
13.1	Meingkatnya APK	13.1.1	APK PAUD	54,00 %
		13.1.2	APK SD/MI	100,00 %
		13.1.3	APK SMP/MTs	98,20 %
		13.1.4	APK SMA/MA/SMK	88,60 %
13.2	Meingkatnya APM	13.2.1	APM SD/MI/PAKET A	94,00 %
		13.2.2	APM SMP/MTs/PAKET B	71,61 %
		13.2.3	APM SMA/MA/SMK/PAKET C	62,37 %
TUJUAN 14 : MENINGKATKAN RATA-RATA NILAI UN				
14.1	Meningkatnya rata-rata nilai UN	14.1.1	Persentase Angka kelulusan SD/MI	100,00 %
		14.1.2	Persentase Angka kelulusan SMP/MTs	100,00 %
		14.1.3	Persentase Angka kelulusan SMA/MA	100,00 %
		14.1.4	Persentase Angka kelulusan SMK	100,00 %
TUJUAN 15 : TERWUJUDNYA MINAT BUDAYA BACA MASYARAKAT				
5.1	Meningkatnya minat baca masyarakat	15.1.1	Jumlah Pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan Umum dan Pondok Baca	60.000 Orang
TUJUAN 16 : MENURUNKAN JUMLAH KAWASAN KRITIS DI DALAM KAWASAN HUTAN DAN LUAR KAWASAN HUTAN				
16.1	Menurunya luas lahan kritis	16.1.1	Rehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan	23.040,3 Ha
		16.1.2	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	0,45 Ha
TUJUAN 17 : MENURUNKAN Persentase KERUSAKAN HUTAN				
17.1	Menurunya Persentase kerusakan hutan	17.1.1	Kerusakan kawasan hutan	0,028 Ha
TUJUAN 18 : MENGURANGI PENCEMARAN TANAH, AIR DAN UDARA YANG DISEBABKAN OLEH ADANYA USAHA/KEGIATAN				
18.1	Tercapainya ambang batas pencemaran tanah, air dan udara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	18.1.1	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber-HPL / HGB	10,00 %
		18.1.2	Persentase pencemaran mutu air	2,33 %
TUJUAN 19 : MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM ATAS HAK KEPEMILIKAN				
19.1	Terwujudnya penyelesaian konflik tanah dan masalah sosial lainnya	19.1.1	Persentase bantuan hukum yang tertangani	100,00 %
		19.1.2	Persentase penyelesaian kasus tanah	32,57 %
TUJUAN 20 : MENINGKATKAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN				
20.1	Meningkatnya kualitas produk hukum daerah	20.1.1	Jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan :	

			<ul style="list-style-type: none">- Peraturan Daerah- Peraturan Bupati- Keputusan Bupati- Instruksi Bupati	15 Perda 20 Perbub 300 Keppub 5 Instruksi
TUJUAN 21 : MENINGKATKAN PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA, KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK, EKSPLOITASI DAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK				
21.1.	Menurunya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	21.1.1	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	83,00 %
		21.1.2	Persentase penyelesaian pengaduan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	90,00 %
		21.1.3	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur	0,046 %
TUJUAN 22 : MENINGKATKAN KESETARAAN GENDER BAIK DALAM BIDANG PEMBANGUNAN, SWASTA MAUPUN POLITIK				
22.1	Meningkatnya peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan	22.1.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah	4,00 %
		22.1.2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	66,00 %
TUJUAN 23 : MENINGKATKAN AKSESIBILITAS PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT PENYANDANG MASALAH				
23.1	Meningkatnya jumlah rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi KK Miskin	23.1.1	Persentase rumah layak huni	87,78 %
		23.1.2	Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih	79,23 %
		23.1.3	Persentase Rumah Tangga pengguna listrik	71,30 %
23.2	Meningkatnya penanganan PMKS	23.1.4	Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni	6.096 Unit
		23.2.1	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	70,17 %
TUJUAN 24 : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS, BEBAS KORUPSI, PROFESIONAL DAN BERBASIS HUKUM				
24.1	Tertibnya pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah	24.1.1	Tingkat kebocoran keuangan negara/daerah	0,40 %
24.2	Meningkatnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK-RI	24.2.1	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI	76,38 %
		24.2.2	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP	54,68 %
TUJUAN 25 : MENINGKATKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				
25.1	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	25.1.1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	0,68 %
		25.1.2	Rasio pasangan ber-akta nikah	0,04 %
		25.1.3	Kepemilikan E-KTP	66,00 %

		25.1.4	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	247,60 %
TUJUAN 26 : PENINGKATKAN KOMPETENSI DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA				
26.1	Meningkatnya kompetensi dan produktifitas tenaga kerja	26.1.1	Tingkat partisipasi angkatan kerja	68,54 %
		26.1.2	Pencari kerja yang ditempatkan	25,56 %
		26.1.3	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	90 Orang
		26.1.4	Rasio daya serap tenaga kerja	10,22 %
		26.1.5	Rasio penduduk yang bekerja	96,41 %
TUJUAN 27 : MENINGKATKAN KOORDINASI PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN				
27.1	Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	27.1.1	Jumlah linmas per 10.000 penduduk	36,37 %
		27.1.2	Jumlah masyarakat yang terlayani dengan program JAMKESDA	500 Orang
		27.1.3	Angka kriminalitas	11,67 %
		27.1.4	Tingkat penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, Keindahan (K3) di Kabupaten Manggarai	100 %
		27.1.5	Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Manggarai	B (62,25)
TUJUAN 28 : MENINGKATKAN PELAYANAN BENCANA KEBAKARAN				
28.1	Meningkatnya pelayanan bencana	28.1.1	Tingkat waktu tanggap (Responsive time rate) daerah layanan wilayah manajemen bencana : - Waktu tanggap : 1 x 24 jam - Penanganan darurat : 3 x 24 jam - Waktu perbaikan : 14 x 24 jam	 24 Jam 72 Jam 336 Jam

2.4. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen dari penerima amanah bahwa yang bersangkutan memiliki kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan apa yang telah diperjanjikan dan apa yang dilakukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Artinya bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berikut anggarannya masing-masing serta seluruh sumber daya yang digunakan akan diarahkan pada

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja tersebut. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun berkenan / bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud sebagai dampak/akibat /impact dari program dan kegiatan-kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dalam konteks ini terkandung makna bahwa program dan kegiatan memang terencana dan berkesinambungan (*sustainable*).

Sedangkan tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah (1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur; (2) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; (3) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; (4) sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah dan (5) sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Berikut ini adalah formulir lampiran Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai tahun 2016 yaitu sebagai berikut :

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PEMERINTAH KABUPATEN**

KABUPATEN : **MANGGARAI**
TAHUN ANGGARAN : **2016**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1		2		3
TUJUAN 1 : MENINGKATKAN KUALITAS PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN YANG BERORIENTASI PADA PERMINTAAN PASAR				
1.1	Meningkatnya kualitas produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan yang berorientasi pada permintaan pasar	1.1.1	PDRB Kabupaten Manggarai (ADHB)	Rp. 3.373.209
		1.1.2	Pertumbuhan PDRB ADHK	5,20 %
		1.1.3	PDRB ADHK	Rp. 2.472.374,19
		1.1.4	PDRB perkapita ADHB	Rp. 9.810.442
		1.1.5	Persentase penduduk miskin	19,73 %
		1.1.6	Pertumbuhan Ekonomi	5,20 %
		1.1.7	Produktivitas Padi atau bahan pangan utama Lokal lainnya per hektar	4,71 Ton/Ha

		1.1.8	Kontribusi sektor pertanian /perkebunan terhadap PDRB ADHB (dln juta rupiah)	Rp. 25.74
		1.1.9	Kontribusi sektor Perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	1,93 %
		1.1.10	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	8,95 %
		1.1.11	Kontribusi sector industri terhadap PDRB	0,5 %
		1.1.12	Persentase pertumbuhan industri	0,2 %
		1.1.13	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp. 1.968.323
TUJUAN 2 : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS, BEBAS KORUPSI , PROFESIONAL DAN BERBASIS HUKUM				
2.1	Meningkatnya jumlah PAD	2.1.1	Jumlah PAD (dalam jutaan)	Rp. 82
		2.1.2	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	5 Perda
TUJUAN 3 : MENINGKATKAN PRODUKSI PERIKANAN				
3.1	Meningkatnya produksi perikanan	3.1.1	Produksi perikanan	6.000 Ton
		3.1.2	Produksi perikanan budidaya : - Air tawar - Air payau	137 Ton 115 Ton 22 Ton
		3.1.3	Produksi rumput laut	13,00 Ton
TUJUAN 4 : MENINGKATKAN KEANEKARAGAMAN DIVERSIFIKASI KETERSEDIAAN DAN KONSUMSI PANGAN				
4.1	Meningkatnya keaneka- ragaman konsumsi pangan angka kecukupan energi aktual	4.1.1	Ketersediaan pangan utama	100,00 %
		4.1.2	Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRD	25,74 %
		4.1.3	Ketersediaan energi dan protein perkapita	100,00 %
		4.1.4	Penguatan cadangan pangan	71,00 %
		4.1.5	Skor pola pangan harapan (PPH)	85,90 %
TUJUAN 5 : MENCIPTAKAN KELANCARAN TRANSPORTASI LAUT MENGHUBUNGKAN PELABUHAN DENGAN DESTINASI WISATA PULAU FLORES				
5.1	Meningkatnya arus kunjungan wisatawan bahari pada destinasi wisata di wilayah Flores	5.1.1	Kunjungan wisata	100,00 %
		5.1.2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	0,79 %
5.2	Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan jalan dan jembatan	5.2.1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,50 Km/Unit
		5.2.2	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	58,34 %
		5.2.3	Jumlah arus penumpang angkutan umum	2.203.437 Penumpa ng
TUJUAN 6 : MENINGKATKAN STATUS GIZI MASYARAKAT				
6.1	Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (undeweight) pada anak balita	6.1.1	Persentase balita gizi buruk yang tertangani	100,00 %
		6.1.2	Persentase rumah tinggal bersanitasi	64,99 %

		6.1.3	Angka usia harapan hidup	67,69 Tahun
TUJUAN 7 : MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI				
7.1	Menurunnya angka kematian bayi	7.1.1	Angka kematian bayi	16,13 KH
7.2	Menurunnya angka kematian ibu	7.2.1	Angka kematian ibu	126,25 KH
TUJUAN 8 : MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN BLUD RSUD dr. BEN MBOY SEBAGAI RS TYPE C DAN RS RUJUKAN REGIONAL				
8.1	Meningkatnya mutu layanan rumah sakit	8.1.1	Persentase tingkat kepuasan pelanggan	80,00 %
TUJUAN 9 : MENURUNKAN TFR (TOTAL FERTILITY RATE)				
9.1	Menurunnya TFR	9.1.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga (TFR)	3,35 %
TUJUAN 10 : MENINGKATKAN CPR				
10.1	Meningkatnya CPR	10.1.1	Cakupan peserta KB aktif (CPR)	67,63 %
TUJUAN 11 : MENURUNKAN LPP KABUPATEN MANGGARAI				
11.1	Menurunnya laju partum-buhan penduduk	11.1.1	Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,63 %
TUJUAN 12 : MENURUNKAN UNMET NEED				
12.1	Menurunnya Unmet Need	12.1.1	Persentase cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tetapi tidak terpenuhi	15,94 %
TUJUAN 13 : MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA JENJANG PENDIDIKAN PAUD,PENDIDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH				
13.1	Meingkatkan APK	13.1.1	APK PAUD	54,00 %
		13.1.2	APK SD/MI	100,00 %
		13.1.3	APK SMP/MTs	98,20 %
		13.1.4	APK SMA/MA/SMK	88,60 %
13.2	Meingkatkan APM	13.2.1	APM SD/MI/PAKET A	94,00 %
		13.2.2	APM SMP/MTs/PAKET B	71,61 %
		13.2.3	APM SMA/MA/SMK/PAKET C	62,37 %
TUJUAN 14 : MENINGKATKAN RATA-RATA NILAI UN				
14.1	Meningkatnya rata-rata nilai UN	14.1.1	Persentase Angka kelulusan SD/MI	100,00 %
		14.1.2	Persentase Angka kelulusan SMP/MTs	100,00 %
		14.1.3	Persentase Angka kelulusan SMA/MA	100,00 %
		14.1.4	Persentase Angka kelulusan SMK	100,00 %

TUJUAN 15 : TERWUJUDNYA MINAT BUDAYA BACA MASYARAKAT				
5.1	Meningkatnya minat baca masyarakat	15.1.1	Jumlah Pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan Umum dan Pondok Baca	60.000 Orang
TUJUAN 16 : MENURUNKAN JUMLAH KAWASAN KRITIS DI DALAM KAWASAN HUTAN DAN LUAR KAWASAN HUTAN				
16.1	Menurunya luas lahan kritis	16.1.1	Rehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan	23.040,37 Ha
		16.1.2	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	0,45 Ha
TUJUAN 17 : MENURUNKAN Persentase KERUSAKAN HUTAN				
17.1	Menurunya Persentase kerusakan hutan	17.1.1	Kerusakan kawasan hutan	0,028 Ha
TUJUAN 18 : MENGURANGI PENCEMARAN TANAH, AIR DAN UDARA YANG DISEBABKAN OLEH ADANYA USAHA/KEGIATAN				
18.1	Tercapainya ambang batas pencemaran tanah, air dan udara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	18.1.1	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber-HPL / HGB	10,00 %
		18.1.2	Persentase pencemaran mutu air	2,33 %
TUJUAN 19 : MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM ATAS HAK KEPEMILIKAN				
19.1	Terwujudnya penyelesaian konflik tanah dan masalah sosial lainnya	19.1.1	Persentase bantuan hukum yang tertangani	100,00 %
		19.1.2	Persentase penyelesaian kasus tanah	32,57 %
TUJUAN 20 : MENINGKATKAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN				
20.1	Meningkatnya kualitas produk hukum daerah	20.1.1	Jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan : - Peraturan Daerah - Peraturan Bupati - Keputusan Bupati - Instruksi Bupati	15 Perda 20 Perbub 300 Keppub 5 Instruksi
TUJUAN 21 : MENINGKATKAN PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA, KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK, EKSPLOITASI DAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK				
21.1	Menurunya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	21.1.1	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	83,00 %
		21.1.2	Persentase penyelesaian pengaduan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	90,00 %
		21.1.3	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur	0,046 %
TUJUAN 22 : MENINGKATKAN KESETARAAN GENDER BAIK DALAM BIDANG PEMBANGUNAN, SWASTA MAUPUN POLITIK				
22.1	Meningkatnya peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan	22.1.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah	4,00 %
		22.1.2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	66,00 %

TUJUAN 23 : MENINGKATKAN AKSESIBILITAS PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT PENYANDANG MASALAH				
23.1	Meningkatnya jumlah rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi KK Miskin	23.1.1	Persentase rumah layak huni	87,78 %
		23.1.2	Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih	79,23 %
		23.1.3	Persentase Rumah Tangga pengguna listrik	71,30 %
		23.1.4	Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni	Unit 6.096
23.2	Meningkatnya penanganan PMKS	23.2.1	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	70,17 %
TUJUAN 24 : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS, BEBAS KORUPSI, PROFESIONAL DAN BERBASIS HUKUM				
24.1	Tertibnya pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah	24.1.1	Tingkat kebocoran keuangan negara/daerah	0,40 %
24.2	Meningkatnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK-RI	24.2.1	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI	76,38 %
		24.2.2	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP	54,68 %
TUJUAN 25 : MENINGKATKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				
25.1	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	25.1.1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	0,68 %
		25.1.2	Rasio pasangan ber-akta nikah	0,04 %
		25.1.3	Kepemilikan E-KTP	66,00 %
		25.1.4	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	247,60 %
TUJUAN 26 : PENINGKATKAN KOMPETENSI DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA				
26.1	Meningkatnya kompetensi dan produktifitas tenaga kerja	26.1.1	Tingkat partisipasi angkatan kerja	68,54 %
		26.1.2	Pencari kerja yang ditempatkan	25,56 %
		26.1.3	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	90 Orang
		26.1.4	Rasio daya serap tenaga kerja	10,22 %
		26.1.5	Rasio penduduk yang bekerja	96,41 %
TUJUAN 27 : MENINGKATKAN KOORDINASI PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN				
27.1	Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	27.1.1	Jumlah linmas per 10.000 penduduk	36,37 %
		27.1.2	Jumlah masyarakat yang terlayani dengan program JAMKESDA	500 Orang

		27.1.3	Angka kriminalitas	11,67 %
		27.1.4	Tingkat penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, Keindahan (K3) di Kabupaten Manggarai	100 %
		27.1.5	Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Manggarai	B (62,25)
TUJUAN 28 : MENINGKATKAN PELAYANAN BENCANA KEBAKARAN				
28.1	Meningkatnya pelayanan bencana	28.1.1	Tingkat waktu tanggap (Responsive time rate) daerah layanan wilayah manajemen bencana : - Waktu tanggap : 1 x 24 jam - Penanganan darurat : 3 x 24 jam - Waktu perbaikan : 14 x 24 jam	24 Jam 72 Jam 336 Jam

JUMLAH ANGGARAN untuk PROGRAM STRATEGIS TAHUN 2016 adalah Rp.637.633.241.110,-